

DAFTAR BACAAN

Buku

- Abdullah, Rozali, *Perkembangan Hak Asasi Manusia dan Keberadaan Peradilan Hak Asasi Manusia Di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia Jakarta, 2001.
- Asshidiqie, Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006.
- Campbell, Tom, *Human Rights and the Partial Eclipse of Justice dalam Arend Soeteman, Pluralisme and Law*, London: Kluwer Academi Publishers, 2001.
- Effendi, Masyhur, *Dimensi/Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- El-Muhtaj, Majda, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia: Dari UUD 1945 sampai dengan Amandemen UUD 1945 Tahun 2002*, Jakarta: Kencana Pernada Media Group, 2009.
- Fatimah, Elly dan Erna Irawati, *Modul Pelatihan Dasar Calon PNS Manajemen Aparatur Sipil Negara*, Edisi Revisi Februari 2017, Jakarta: LAN, 2017.
- Gaffar, Afan, *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Hadjon, Philipus M., et. al., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1994.
- Hartini, Sri dan Tedi Sudrajat, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Hazell, Robert, Ben Worthy & Mark Glover, *Impartiality (The Impact of the Freedom of Information Act on Central Government in the UK: Does FOI work?)*, London: Palgrave McMillan, 2010.
- Hutchinson, Terry, *Research and Writing in Law*, Sydney: Lawbook Co, 2002.
- Kartini, Dede Sri (Ed.), *Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019: Perihal Penyelenggaraan Kampanye*, Jakarta: Badan Pengawas Pemilihan Umum, 2019.
- Kasim, Idfhal (Ed.), *Hak Sipil dan Politik Esai-Esai Pilihan*. Cetakan Pertama, Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), 2001.
- Korpri DKI Jakarta, *Korpri dan Perkembangannya*, Jakarta: Korpri, 1988.
- Kumorotomo, Wahyudi, Nana Rukmana D. Wirapradja, dan Amir Imbaruddin,

- Etika Publik Modul Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III*, Jakarta: LAN, 2015.
- Lubis, Todung Mulya, *Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural*, Jakarta: LP3ES, 1984.
- Marbun, S.F., *Netralitas Pegawai Negeri Dalam Kehidupan Politik di Indonesia*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1998.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Cetakan VI, Edisi I, Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2017.
- , *Penelitian Hukum*, Cetakan XIII, Edisi Revisi, Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2017.
- Mokhsen Nuraida, et. al., *Pengawasan Penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Aparatur Sipil Negara*, Edisi Kedua, Jakarta: Komisi Aparatur Sipil Negara, 2019.
- , Septiana Dwiputrianti, dan Syaugi Muhammad, *Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara*, Jakarta: Komisi Aparatur Negara, 2018.
- Munir, H. Misbahul, *Pemilu, Demokrasi dan Ijtihad Politik Perempuan*, Surabaya: Visipress, 2004.
- Pamungkas, Sigit, *Perihal Pemilu*, Yogyakarta: Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan dan Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Gajah Mada, 2009.
- Rumokoy, Donald Albert dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan 2, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Suhelmi, Ahmad, *Pemikiran Politik Barat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Surbakti, Ramlan, Didik Supriyanto, dan Topo Santoso, *Perekayasa Sistem Pemilu Untuk Pembangunan Tata Politik Demokratis*, Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia, 2008.
- Suseno, Franz Magnis, *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- YKPI, *Peranan dan Tugas Pegawai Republik Indonesia dalam Pembangunan*, Jakarta: YKPI, 1984.

Jurnal

- Ayusari, Tri Widhi, Tedi Sudrajat, dan Sri Hartini, 'Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Implikasinya terhadap

- Hak dan Kewajiban Kepegawaian (Studi di Kabupaten Banyumas)', S.L.R, Volume 2, Nomor 1.
- Fatimah, Siti, 'Kampanye sebagai Komunikasi Politik: Esensi dan Strategi dalam Pemilu'. Jurnal Resolusi, Volume 1, Nomor 1, 2018.
- Hartini, Sri, 'Penegakan Hukum Netralitas Pegawai Negeri Sipil (PNS)', Jurnal Dinamika Hukum: Volume 9, Nomor 3, 2009.
- , Setiajeng Kadarsih, dan Tedi Sudrajat, 'Kebijakan Netralitas Pegawai Negeri Sipil dalam Pemilukada (Studi di Jawa Tengah)', Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum, Volume 1, Nomor 3, 2014.
- Hasan, M. Nur, 'Tantangan Demokrasi di Indonesia', Jurnal Aspirasi Magister Ilmu Hukum Trisakti, Volume XVI, Nomor 1, Juli 2006.
- Hasan, Muhardi dan Estika Sari, 'Hak Sipil dan Politik', Demokrasi, Volume IV Nomor 1, 2005.
- Hasnati, 'Pertautan Kekuasaan Politik dan Negara Hukum', Jurnal Hukum Republica Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru, Volume 3, Nomor 1, 2003.
- Luthan, Salman, 'Dialektika Hukum dan Moral dalam Perspektif Filsafat Hukum', Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Volume 19, Nomor 4, 2012.
- Mokoagow, Stevenril, 'Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah', Jurnal Lex Administratum, Volume IV, Nomor 4, 2016.
- Nugraha, Harry Setya, Dimar Simarmata, dan Imentari Siin Sembiring, 'Politik Hukum Pengaturan Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018', Jurnal Justisi Hukum, Volume 3, Nomor 1, 2018.
- Perdana, Gema, 'Menjaga Netralitas ASN dari Politisasi Birokrasi', Jurnal Negara Hukum, Volume 10, Nomor 1, 2019.
- Putrianti, Septiana Dwi, 'Tantangan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Menegakkan Netralitas Menuju Reformasi Birokrasi Aparatur Sipil Negara', Journal of Chemical Information and Modeling, Volume 53, Nomor 9, 2019.
- Samekto, FX. Adji, 'Menggugat Relasi Filsafat Positivisme dengan Ajaran Hukum Doktrinal', Jurnal Dinamika Hukum, Volume 12, Nomor 1, 2012.
- Sidharta, B. Arief, 'Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum', Jentera (Jurnal Hukum), "Rule of Law", Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK): Edisi 3 Tahun II, November 2004.

- Sudrajat, Tedi, 'Implikasi Hukum Pembatasan Peran Serta Pegawai Negeri Sipil dalam Proses Politik di Indonesia', *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 11, Nomor 3, 2011.
- Tome, Abdul Hamid, 'Reformasi Birokrasi dalam Rangka Mewujudkan Good Governance Ditinjau dari Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010', *Jurnal Hukum Unsrat*, Volume XX, Nomor 3, April-Juni 2012.
- Widodo, Slamet, 'Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Masa Pemilihan Umum', *Journal of Chemical Information and Modeling*, Volume 53, Nomor 9, 2019.
- Wiratraman, R. Herlambang Perdana, 'Hak-Hak Konstitusional Warga Negara Setelah Amandemen UUD 1945: Konsep, Pengaturan dan Dinamika Implementasi', *Jurnal Hukum Panta Rei*, Volume 1, Nomor 1, 2007.
- Zifirman, 'Ontologi Demokrasi', *Jurnal Hukum FH Universitas Sultan Agung (UNISULA)*, Volume 14, Nomor 2, 2006.

Skripsi

- Aldrin, Wailim, *Larangan Terhadap Aparatur Sipil Negara dalam Kegiatan Politik*, **Skripsi**, Program Sarjana Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2017.
- Amin, La Ode Muh., *Netralitas Birokrat Pemerintahan pada Dinas Pendidikan Kota Makassar dalam Pemilukada di Kota Makassar (Pemilihan Walikota Makassar Tahun 2008)*, **Skripsi**, Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, Makassar, 2013.
- Mulyono, Z.R.P.TJ., *Kebijakan Netralitas Politik Pegawai Negeri Sipil dalam Perspektif Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, **Tesis**, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang, 2008.

Internet

- Anonim, "Hak Politik Warga Negara (Sebuah Perbandingan Konstitusi)", Artikel Hukum Tata Negara dan Peraturan Perundang-undangan, <https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/294-hak-politik-warga-negara-sebuah-perbandingan-konstitusi.html>, diakses pada tanggal 15 Agustus 2019.

- , “Jelang Pilkada Serentak 2020, ASN Diimbau Jaga Netralitas”, <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/jelang-pilkada-serentak-2020-asn-diimbau-jaga-netralitas>, 28 November 2019, diakses pada tanggal 28 Maret 2020.
- Asshiddiqie, Jimly, “Gagasan Negara Hukum Indonesia”, https://pn-gunungsitoli.go.id/assets/image/files/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf, diakses pada tanggal 28 Agustus 2019.
- KASN, Administrator, “Sosialisasi Netralitas ASN pada PILKADA Serentak 2020”, <https://www.kasn.go.id/details/item/552-sosialisasi-netralitas-asn-pada-pilkada-serentak-2020>, 27 Februari 2020, diakses pada tanggal 2 April 2020.
- Parsaoran, Jimmy Arief Saud, “Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Kepala Daerah”, <http://bkpsdmd.babelprov.go.id/content/netralitas-aparatur-sipil-negara-dalam-pemilihan-kepala-daerah>, 31 Mei 2018, diakses pada tanggal 22 Desember 2020.
- Rusdiyani, Novita, “KASN-Bawaslu Rilis Data Pengawasan Netralitas ASN Tahun 2019 dan 2020”, <https://ppid.kasn.go.id/ksn-bawaslu-rilis-data-pengawasan-netralitas-asn-tahun-2019-dan-2020/>, 2 Juli 2020, diakses pada tanggal 23 Desember 2020.
- Sukmasari, Rehbina, “Aparatur Sipil Negara dan Netralitas yang Pantas”, <https://www.pajak.go.id/id/artikel/aparatur-sipil-negara-dan-netralitas-yang-pantas>, diakses pada tanggal 3 April 2020.
- Tinangon, Meidy Yafeth, “Anatomi Definisi Kampanye Pemilu 2019”, https://www.kpu.go.id/index.php/post/read/kqBok4pWuPZsH7KQESGq31WVuNeedWBguk3bfRYapzSqxy4S8stEqxQbmLLrOxjMkfrP9_98xaPnqHpJmtvhQ~/13hsmCL7pgsaHRVqAXdRul2keqDFcO2absIQdZ-RAXSFODCrj_qr92e-IqJF-bWFMKqHY7_WmrXhtHFGtiKrqa~, 26 Maret 2019, diakses pada tanggal 4 April 2020.

Siaran Pers

- Ridwan, Mohammad, “Jelang Pilpres dan Pileg, Ini Larangan yang Harus Diperhatikan ASN”, Siaran Pers, No. 053/RILIS/BKN/II/2019, Jakarta, 8 Februari 2019.

Naskah Akademik Peraturan Perundang-undangan

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, <https://luk.staff.ugm.ac.id/atur/UU5-2014NaskahAkademikRUU-ASN.pdf>, diakses pada tanggal 4 November 2020.

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/RJ1-20160408-091420-3870.pdf>, diakses pada tanggal 4 November 2020.

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/RJ1-20161117-115025-2971.pdf>, dikunjungi pada tanggal 4 November 2020.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Universal Declaration of Human Rights 1948, proclaimed by United Nations General Assembly Resolution No. 217 A.

International Covenant on Civil and Political Rights 1966, adopted and opened for signature, ratification and accession by General Assembly Resolution 2200A (XXI).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1970 tentang Pencabutan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 1959 tentang Larangan Keanggotaan Partai Politik bagi Pejabat Negeri Warga Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3062).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1976 tentang Keanggotaan Pegawai Negeri Sipil dalam Partai Politik atau Golongan Karya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pegawai Negeri Sipil yang Menjadi Anggota Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3801).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pegawai Negeri Sipil yang Menjadi Anggota Partai Politik

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3808).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Anggota Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4440).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264).

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959 tentang Larangan Keanggotaan Partai Politik bagi Pejabat Negeri Warga Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1825).

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 827).

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 973).

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23

Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1174).

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1067).

Surat Edaran KASN Nomor B-2900/KASN/11/2017, tanggal 10 November 2017.

Surat Edaran Menteri PANRB Nomor B/71/M.SM.00.00/2017, tanggal 27 Desember 2017.